

RINGKASAN

Dalam kehidupan dunia modern seperti sekarang ini, dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat serta meningkatnya pendidikan, tuntutan ekonomi, dan lajunya pertumbuhan penduduk di Indonesia, menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi semakin kompleks. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kedokteran dan kesehatan yang bermutu pada umumnya sudah tidak dapat ditunda lagi, sehingga masyarakat yang berkembang secara medis ini menuntut pelayanan profesional yang mutakhir dan manusiawi. Tampaknya tuntutan ini sangat idealistis, namun menjadi tugas profesi kedokteran untuk sedapat mungkin mewujudkannya, agar masyarakat tetap percaya pada sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tindakan hukum apabila tidak diindahkannya persetujuan tindakan medik dalam praktek kedokteran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berlingkup pada akibat hukum yang ditimbulkan dengan tidak diberikan informasi sebelum pasien memberikan persetujuan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan kartu sistem (card system) yang terdiri dari kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis normatif.